

RELEVANSI PANDANGAN GEREJA TENTANG POLITIK BAGI KARYA PASTORAL DI PAROKI KATEDRAL ST. MARIA PALANGKA RAYA¹

Hunayati

STIPAS Tahasak Danum Pabelum

Email: nverou@gmail.com

Abstract:

This article explores how the Catholic Church's relevance about politics as the pastoral work especially to the Parish of Cathedral St. Maria Palangka Raya. The Catholic Church holds that the political participation of citizens is crucial for the creation of policies that ensure the common good. Therefore, the efforts to introduce political and sustainable activities in relation to political education for the people need to be enhanced in order to realize that politics is also the field of Church pastoral work.

Keywords:

Catholic's Church, Participation, Politics, Pastoral, Parish

Latar Belakang

Dewasa ini, umat Katolik merasa tidak begitu nyaman berbicara tentang politik sebagai medan pengabdian. Ketakutan berbicara tentang

1 Artikel ini pernah dimuat oleh Jurnal Berbagi

politik tampaknya dilatari oleh berbagai perilaku tidak terpuji yang dipertontonkan oleh elite politik, seperti perlombaan untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan dengan mengabaikan kepentingan umum, korupsi yang menggerogoti kebaikan bersama serta berbagai perilaku tidak pantas lainnya yang didukung oleh kekuasaan politik. Hal-hal demikian telah mengundang sinisme terhadap dunia politik dan serentak memandang politik sebagai dunia hina yang seakan-akan hanya diperuntukkan bagi manusia yang tidak bermoral.

Gereja Katolik menempatkan politik sebagai perwujudan dari keterlibatan umat Allah dalam dunia sebagaimana ditegaskan *Gaudium et Spes* a. 75.

Hendaknya para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air, tetapi tanpa berpandangan picik sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia yang terhimpun melalui pelbagai ikatan antarsuku, antarbangsa, dan antarnegara.²

Jelaslah bahwa Gereja Katolik melihat politik sebagai sesuatu yang baik, mutlak perlu bagi manusia dan berpijak pada kemanusiaan untuk kebaikan umum. Dengan demikian, seorang beriman Katolik dituntut untuk tetap setia menjadi seorang warga negara yang baik dengan tidak mengabaikan politik.

Dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, umat Katolik juga terlibat aktif dalam politik. Seorang Uskup yang pro-nasionalis, yakni Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, mengatakan bahwa antara Gereja dan politik, kita harus bisa menjadi seorang yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Pemikiran beliau masih sangat relevan bagi Gereja dan umat Katolik yang berkecimpung dalam bidang politik.

Sejatinya, umat Katolik dan khususnya politisi Katolik dituntut untuk menunjukkan jati diri sebagai seorang pengikut Kristus dalam berpolitik dengan berpijak pada nilai-nilai kristiani. Meski demikian, tampaknya hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pengalaman menampilkan bahwa hingga kini masih ada perilaku politik umat Katolik yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani, seperti terlibat dalam *money politic*. Hal ini

2 *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana, SJ (Jakarta: Obor, 2004), hlm. 627.

merupakan indikasi tentang pendidikan dan pencitraan politik yang kurang baik serta sekaligus menunjukkan pemahaman yang salah tentang politik. Demikianlah, artikel ini mengetengahkan pandangan Gereja tentang politik dan bagaimana relevansinya bagi karya pastoral di paroki.

Merangkai Makna Politik

Arti Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani dari akar kata *polis* yang berarti negara-kota. Istilah lain digunakan oleh Plato³ dalam bahasa Yunani ialah *politeia* yang berarti negara ideal.⁴ Aristoteles kemudian menggunakan kata *politikon* yang memiliki arti tentang kenegaraan. Aristoteles⁵ juga mengungkapkan bahwa manusia adalah *zoon politikon*; manusia adalah makhluk politik⁶. Dengan itu ia ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya politik merupakan hakikat kehidupan sosial dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti merupakan hubungan politis. Aristoteles melihat hal ini sebagai kecenderungan alamiah dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya dari kebersamaan dengan orang lain.

Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan ketika mereka berupaya memengaruhi

3 Plato adalah seorang filsuf Yunani yang lahir sekitar 427 SM – meninggal sekitar 347 SM, ia adalah murid dari Sokrates dan guru dari Aristoteles. Bdk. K Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 115.

4 A. Heuken, *Ensiklopedi Gereja – Jilid VII: Pi-Sek*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005), hlm. 25.

5 Aristoteles (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai topik yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. Bersama dengan Sokrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Bdk. K Bertens, *op.cit.*, hlm. 154-157.

6 Ikatan Sarjana Katolik, *Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama* (Jakarta: Obor, 2008), hlm. 4.

orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sebenarnya sedang mewujudkan hakikat politik.⁷ Dengan demikian, menurut Aristoteles setiap orang adalah politisi dan cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan yang tertinggi adalah melalui interaksi politis dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan yang mana kerangka itu dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif.

Antara abad keenam belas sampai awal abad kedua puluh, politik diartikan lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. Jean Bodin⁸, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (*science politique*). Definisi tentang politik, juga diungkapkan oleh Montesquieu⁹, yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan ke dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁰ Berdasarkan perspektif ini, bisa dipahami bahwa para ahli ilmu politik akan memusatkan perhatian, semata-mata pada organisasi dan sistem kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, yang melaksanakannya, dan yang menampung pertentangan yang timbul dari kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam dalam menafsirkan undang-undang.

Max Weber¹¹ mendefinisikan politik sebagai sarana perjuangan untuk bersama-sama memengaruhi pembagian kekuasaan, baik di antara

7 Carlton Clymer Rodee dkk (ed.), *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2.

8 Jean Bodin (1530–1596) adalah orang Perancis dan filsuf politik, anggota dari parlemen di Paris, dan profesor hukum di Toulouse, ia terkenal dengan teori kedaulatan rakyat yang dibuatnya. Bdk. http://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin, diakses pada 18 Desember 2014.

9 Montesquieu (1689-1755) adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Bdk. F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 111.

10 Carlton Clymer Rodee dkk (ed), *op.cit.*, hlm. 3.

11 Max Weber (1864–1920) adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Bdk. Soeryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), hlm. 351-352.

negara-negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara.¹² Dalam perkembangan selanjutnya, pemahaman mengenai politik di kalangan sebagian para ahli ilmu politik sejak tahun 1950-an mengalami pergeseran yang cukup signifikan bahkan para ilmuwan politik kontemporer sekarang ini cenderung kembali pada pemahaman politik orang-orang Yunani. Mereka berpendapat bahwa politik bukan hanya menyangkut lembaga-lembaga negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi, politik sebenarnya merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga negara, kepentingan, kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum, *lobbying*, perumusan, penerapan dan penafsiran undang-undang. Singkatnya, politik berarti cara mengatur dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik demi kesejahteraan seluruh bangsa. Politik merupakan seni menata kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga seluruh warga mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk terlibat dalam pembangunan bangsa.

Politik dalam Pandangan Gereja Katolik

Visi Politik

Kehidupan politik dan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan begitu saja. Sebagai warga negara yang baik umat Katolik juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk ambil bagian dalam memperjuangkan kebaikan bersama yang merupakan tujuan politik. Dalam keterlibatan itu, umat Katolik dituntut untuk berpijak dan menampilkan nilai-nilai Injili. Nilai-nilai itu adalah 1) inklusif (non diskriminatif), 2) *preferential option for the poor*, 3) menjunjung nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia), 4) solidaritas dan subsidiaritas, dan 5) *bonum publicum/bonum commune*.¹³

Nilai-nilai Injili tersebut harus menjadi dasar visi politik bagi umat Katolik untuk membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab dan mengabdikan pada kepentingan bersama terutama kelompok masyarakat

12 Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 22.

13 D. Gusti Bagus Kusumawanta, Pr. MIRIFICA News: Gereja Dan Politik, , diakses 11 April 2014, pkl. 19.25.

yang tertindas dan menderita. Umat Katolik diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dengan tidak membedakan status sosial seseorang, berpihak kepada mereka yang miskin (tertindas dan menderita), menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana seharusnya, menerapkan prinsip solider dan saling membantu kepada mereka yang membutuhkan untuk mencapai kebaikan bersama.

Spiritualitas Politik

Dekrit tentang Kerasulan Awam (*Apostolicam Actuositatem*) dari Konsili Vatikan II berbicara tentang kaum awam dan kerasulannya, menegaskan pentingnya kerasulan kaum awam dalam tata dunia: “Kaum awam menunaikan kerasulan mereka yang bermacam-ragam dalam Gereja maupun masyarakat. Dalam kedua tatanan hidup itu terbukalah pelbagai bidang kegiatan merasul” (AA 2). Demikian juga dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini, *Gaudium et Spes*, artikel 75, ditegaskan bahwa semua umat beriman bertanggung jawab dalam urusan mengupayakan kesejahteraan umum, keamanan politik, ekonomi, kebudayaan dan hidup berkeluarga dalam upaya menuju ke kesempurnaan.¹⁴

Umat Katolik dituntut untuk menjiwai tanggung jawab politik seperti yang dituliskan dalam dekrit *Apostolicam Actuositatem* artikel 9 dan Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* artikel 75. Umat Katolik bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, keamanan politik dan lainnya menuju kepada kesempurnaan yang diharapkan oleh Gereja bagi kehidupan masyarakat.

Panggilan Gereja dalam Dunia Politik

Dalam politik praktis warga Gereja bebas memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Meskipun demikian, kebebasan bukan tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh rambu-rambu moral, etika dan sopan-santun yang diinspirasi oleh nilai-nilai Injili. Dalam berpolitik, orang Katolik dapat menimba kearifan dari tokoh Gereja dan Pahlawan Negara Mgr.

14 *Ibid.*

Albertus Soegijapranata. Menurut Soegijapranata, ada 3 kearifan dalam berpolitik, yaitu 1) *In Principiis Unitas* (dalam soal prinsipil: persatuan), 2) *In Dubiis Libertas* (dalam hal-hal yang masih terbuka: kebebasan), dan 3) *In Omnibus Caritas* (dalam segala hal: kasih).¹⁵

Umat Katolik dapat menjadikan ketiga kearifan itu sebagai pedoman bagi umat Katolik untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Keterlibatan dalam politik bukanlah sebagai sarana atau kendaraan untuk melebarkan sayap Gereja. Namun, tugas utama umat Katolik adalah ikut berpartisipasi agar tercipta tatanan negara dan masyarakat yang lebih baik.

Karya Pastoral Paroki St. Maria Palangka Raya: Pendidikan Politik sebagai Bentuk Kerasulan Gereja

Gambaran Kerasulan Politik Di Paroki St. Maria Palangka Raya¹⁶

Gereja adalah kumpulan para pengikut Kristus, yang setia berjalan mengikuti-Nya dan menaati kehendak Allah melalui para wakilnya di dunia ini. Pengikut atau murid harus setia tanpa syarat kepada pribadi Yesus, ia harus rela mati dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus

15 *Ibid.*

16 Uraian bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil pengamatan dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus - 16 Agustus 2014 di Paroki St. Maria Palangka Raya. Ada sepuluh informan yang diwawancarai. (1). P. Alex Dato L, SVD. Lahir di Panama, 17 Juli 1950. Kini, Pastor Paroki di Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya. (2) P. Egidius Taimenas, SVD. Lahir di Haekto, 13 September 1975, Pastor rekan di Paroki Katedral St. Maria Palangka Raya. (3) Sr. Maria Columba, SSpS. Lahir di Ruteng, 20 Oktober 1947, Anggota Komunitas Biara SSpS Palangka Raya. (4) Kanisius Rera. Lahir di Ende, 12 April 1969, Wiraswasta, kini berdomisili di Palangka Raya. (5) Stefanus Dhosa Mangu. Lahir di Flores, 14 April 1958, Wiraswasta, kini berdomisili di Palangka Raya. (6) Ida. Lahir Bangkir Rayen, 10 Oktober 1976, PNS / Ibu Rumah Tangga, kini berdomisili di Palangka Raya. (7) Yustinus Suardi. Lahir di Yogyakarta, 04 Februari 1948, Pensiunan PNS, kini berdomisili di Palangka Raya. (8) Erasma Arpete Nilam. Lahir di Penda Asam, 3 Agustus 1954, PNS/ Ibu Rumah Tangga, kini berdomisili di Palangka Raya. (9) Karisma Putra Purwanto. Lahir di Puruk Cahu, 19 Januari 1990, Mahasiswa/ Ketua PMKRI, Palangka Raya. (10) Wahyu Ricky Wijaya. Lahir di Palangka Raya, 13 Mare 1992, Guru Prakarya dan KTK di SMP Katolik St. Paulus –Yayasan Siswarta, Palangka Raya.

karena cinta kepada-Nya. Sikap ini mengandaikan kerendahan hati, kesederhanaan dan taat pada kehendak Allah.

Matius 22:21 boleh dikatakan sebagai dasar biblis yang menjadi pegangan bagi umat Katolik untuk berpartisipasi dalam bidang sosial-politik. Petikan Injil menyatakan demikian: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” Karena itu, pandangan yang menyatakan larangan kepada umat untuk berpolitik tidaklah dibenarkan. Kebenaran Injili ini juga mengingatkan bahwa hierarki memang wajib memberi dukungan kepada seluruh umat Katolik yang terlibat dalam dunia politik. Meski demikian, Gereja tidak dibenarkan untuk memihak kelompok tertentu. Tugas Gereja Katolik adalah mengayomi secara adil dan menyeluruh. Selain itu, pesan ini juga mengingatkan umat Katolik yang terlibat dalam dunia politik agar bisa membedakan mana urusan Gereja dan mana urusan negara. Dua sisi ini tidak boleh dileburkan, tetapi tetap hadir sebagai sisi yang saling melengkapi, saling menguatkan dan saling membangun.

Berdasarkan pengalaman hidup penulis dan pengalaman para informan, ditemukan bahwa politik masih dianggap tabu dan kotor, karenanya umat cenderung acuh tak acuh serta tidak berminat untuk terlibat dalam urusan politik. Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya kerasulan dan katekese tentang politik bertolak dari perspektif Gereja Katolik. Hal ini juga diperparah oleh kurangnya perhatian secara khusus dari petugas pastoral tentang bidang ini. Upaya yang telah dilakukan oleh Paroki St. Maria Palangka Raya hanya sebatas memberikan seruan-seruan profetis dari mimbar semata. Hal ini memang memberikan dampak positif di mana sebagian besar umat menyadari pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya melahirkan pemahaman yang memadai agar umat sungguh terlibat dan tidak menarik diri dari kehidupan berpolitik.

Pesan Injil di atas jelas menyatakan bahwa politik merupakan bagian integral dari suatu komunitas masyarakat. Karena itu, kerasulan dan katekese dalam bidang politik sejatinya perlu dilakukan bagi seluruh

umat. Tentunya, hal itu dilaksanakan dan disesuaikan berdasarkan tingkatan kategori usia umat. Selain itu, pelaksanaannya hendaknya secara berkelanjutan sehingga sejak usia dini menjadi terbiasa dan tidak lagi asing dengan politik. Dengan demikian, dalam pandangan Gereja Katolik politik bukan lagi hal tabu yang hanya dibicarakan politikus saja dan tidak lagi dicampuradukkan “permainan” politikus dengan hakikat politik yang baik. Politik adalah wadah pengabdian bagi banyak orang termasuk umat Katolik. Dalam politik, umat Katolik kiranya sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia bagi masyarakat umum khususnya dalam kehidupan sosial-politik.

Iman kristiani yang sejati bukan saja berhenti pada penyerahan diri secara penuh kepada Allah, namun harus diwujudkan nyata dalam kehidupan nyata sebagai tanggapan atas rahmat Allah kepada manusia. Hal yang perlu diperhatikan adalah pendampingan dan pembinaan berkaitan dengan mengembangkan iman umat dan perwujudannya harus dilaksanakan secara berkesinambungan terutama oleh para petugas pastoral. Karenanya, seorang petugas pastoral harus memiliki pemahaman dan penghayatan yang benar tentang politik sesuai dengan pandangan Gereja Katolik.

Bagi sebagian umat, politik hingga saat ini dinilai kurang menarik. Maka, pembelajaran tentang politik bagi umat sangatlah penting. Di sini, perlu strategi khusus untuk menarik umat agar mau berpartisipasi dalam bidang ini. Salah satu yang harus diperhatikan adalah seorang petugas pastoral harus mampu memberikan materi katekese yang menarik sesuai kategori umat. Proses Katekese Umat yang dijalankan harus mampu menarik minat umat sehingga mereka tergerak hati untuk mengikuti kegiatan katekese politik. Karena itu, seorang petugas pastoral harus bersemangat, lancar berkomunikasi dan harus mampu menjalin relasi yang dekat dan bersahabat dengan umat. Karena dengan relasi sosial yang baik, maka karya pewartaanpun akan diterima dengan baik oleh umat yang dilayani.

Kerasulan dalam Bidang Politik: Panggilan Berpolitik Etis

Bagi seorang kristiani, peran dan keterlibatan aktif dalam politik etis menjadi bagian dari tuntutan tugas panggilan dan perutusannya. Seorang

kristiani dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan berpolitik seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 5:13-16. Seperti halnya garam, para pengikut Kristus dipanggil untuk melakukan segala hal yang menjadikan dunia ini terasa sedap bagi Allah dan semua ciptaan-Nya. Sebagai terang dunia, para pengikut Yesus diimbau agar tidak menyembunyikan apa yang sudah diperoleh dari-Nya, tetapi memakainya untuk menerangi semua orang.

Seorang kristiani, terlebih lagi para politisi Katolik harus siap menjadi agen perubahan dengan keteladanan sikap dan perilaku yang baik. Sebagai orang Katolik mereka harus berani mengatakan tidak atas semua tawaran, bujukan atau strategi yang memasukkan unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan terus-menerus berjuang menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen. Orang Kristen mesti berusaha menyatakan kehendak Allah dan memuliakan nama-Nya dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Setiap umat Katolik memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih berat dalam perkara politik. Peran umat Katolik tidak berhenti pada usaha-usaha menyejahterakan semua orang, tetapi lebih utama melakukan semua itu demi kemuliaan Allah. “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”, inilah ungkapan yang Yesus berikan kepada orang-orang Farisi. Yesus mengajak orang untuk hidup secara bertanggung jawab terhadap pemerintahan dan terlebih lagi terhadap Allah, Allah harus mendapat prioritas dan menjadi pegangan umat-Nya. Karena itu, sebagai warga negara dan warga Kerajaan Allah, umat Katolik harus bisa bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan tanpa harus mengesampingkan kewajiban dalam mengabdikan Allah.

Jika dalam kehidupan umat Allah menyadari panggilannya dalam praktik hidup berpolitik etis, maka keterlibatan sebagai seorang umat Katolik sekaligus warga negara akan sungguh dihayati dan menimbulkan kerinduan untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan Allah. Pendidikan politik yang baik pastinya mampu meminimalisir situasi ini, tentunya dengan pelaksanaannya yang selalu berkelanjutan dan diberikan sedini mungkin. Sehingga seluruh umat Katolik tanpa terkecuali boleh menanggapi panggilan mulia dalam kehidupan politik di tengah dunia.

Implementasi Kerasulan dalam Bidang Politik

Dalam upaya meningkatkan pemahaman politik bagi umat, kerasulan dalam bidang politik mesti menjadi bagian integral dari karya pastoral paroki. Setidaknya, beberapa hal berikut menjadi implikasi praktis dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang politik bagi umat.

Pertama, paroki bertanggung jawab mengadakan pemberdayaan iman umat khususnya dalam kaitan dengan politik dalam perspektif Gereja Katolik. Melalui kegiatan pemberdayaan yang dijalankan oleh paroki, kiranya umat tergerak untuk terlibat secara lebih mendalam pada kehidupan bermasyarakat sebagai suatu tanggung jawab iman kepada Allah melalui orang banyak. Paroki kiranya memberikan wadah dalam usaha memperkenalkan politik bagi segenap anggota Gereja, dan di samping itu dapat melakukan upaya-upaya yang menarik dalam memberikan pembelajaran bagi umat berkaitan dengan politik sehingga umat sungguh tergugah untuk ambil bagian di dalamnya.

Kedua, dalam menjalankan tugas perutusannya Komisi Kerasulan Awam berkewajiban membantu karya pastoral Gereja dalam bidang sosial-politik dengan mengusahakan pengkaderan secara khusus bagi kaum muda maupun umat secara keseluruhan melalui pendidikan politik yang benar serta menciptakan kader-kader Katolik yang berkualitas.

Ketiga, pembinaan para katekis sudah merupakan tuntutan yang mutlak bagi Gereja demi meningkatkan mutu para rasul awam dan pembaruan diri dalam pelayanan pastoral dan pewartaannya. Para katekis harus dibina dan disiapkan secara sungguh-sungguh sesuai dengan kesatuan hidup anggota Gereja dan anggota masyarakat. Seorang katekis perlu mendapat pembinaan aspek intelektual dan emosionalnya serta menimba dari spiritualitas hidup Yesus dalam karya pelayanannya. Pembinaan tersebut kiranya diarahkan agar menempatkan politik sebagai sebuah bidang kerasulan Gereja.

Keempat, politik berjalan beriringan dengan seluruh kehidupan umat dalam kesehariannya. Di sini, politik menjadi bagian penting yang tak bisa dipisahkan dari kesaksian dirinya sebagai seorang kristiani. Karena itu, seluruh umat mesti terbuka dan berpartisipasi dalam kehidupan

berpolitik. Partisipasi dalam kehidupan politik merupakan salah satu wujud pengungkapan iman yang sungguh hidup dan kiranya seluruh umat makin sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Gereja sekaligus warga negara.

Penutup

Semua umat Katolik hendaknya merasakan panggilannya yang khusus dan khas dalam politik. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan politik sangat dibutuhkan sehingga umat memahami bahwa politik memiliki tujuan-tujuan luhur. Keterlibatan dalam dunia politik menunjukkan bahwa Gereja ikut ambil bagian dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib banyak orang dan ikut memperjuangkan kesejahteraan umum serta untuk memantapkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang diteguhkan oleh semangat kristiani. Maka, kerasulan di bidang politik menjadi penting dan hendaknya dikemas secara menarik dan berkelanjutan.

Rujukan:

- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Obor, 2004.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Heuken, A. *Ensiklopedi Gereja – Jilid VII: Pi-Sek*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005.
- Ikatan Sarjana Katolik. *Politik Katolik, Politik Kebajikan Bersama*. Jakarta: Obor, 2008.
- Kusumawanta, D. Gusti Bagus, Pr. “Gereja Dan Politik” dalam *MIRIFICA News*. , Diakses 11 April 2014. Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Rodee, Carlton Clymer, dkk (ed.). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soekanto, Soeryono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin, diakses pada 18 Desember 2014.